

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN
OBJEK REKREASI TAMAN HUTAN RAYA SULTAN SYARIF HASYIM
DI KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
TAHUN 2022-2023**

Oleh: Ayi Fiksa Nanda

Pembimbing: Adlin, S.Sos., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Minas, yang menjadi pelaksana tugas teknis, yang dibentuk oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Riau. Tahura SSH juga dipersiapkan menjadi tujuan wisata alam masyarakat sekitar. Tujuan penelitian untuk mengetahui *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim serta untuk mengetahui apa saja faktor penghambat *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim di Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau Tahun 2022-2023.

Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu memaparkan hasil penelitian tentang *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Di Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau Tahun 2022-2023. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah *Collaborative Governance* telah terlaksana namun belum optimal, karena pada tiga indikator yaitu indikator pertemuan tatap muka, membangun kepercayaan, dan komitmen terhadap proses belum sepenuhnya terlaksana antara UPT KPHP Minas Tahura dengan pemangku kepentingan lainnya. Kendala lain yang dihadapi dalam proses *Collaborative Governance* ini adalah kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta minimnya alokasi anggaran dalam Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim.

Kata kunci : Collaborative Governance, Pengelolaan, Taman Hutan Raya

ABSTRACT

The management of the Sultan Syarif Hasyim Grand Forest Park is carried out by the Technical Implementation Unit of the Minas Model Production Forest Management Unit, which is the technical task executor, established by the Riau Provincial Forestry and Environment Service. The SSH Forest Park (Tahura SSH) is also being prepared as a natural tourism destination for the surrounding community. The purpose of this study was to determine collaborative governance

in the management of the Sultan Syarif Hasyim Grand Forest Park recreational object and to identify the inhibiting factors in the management of the Sultan Syarif Hasyim Grand Forest Park recreational object in Minas District, Siak Regency, Riau Province, in 2022-2023.

This research method uses a qualitative descriptive approach. The data used in this study is descriptive, presenting the results of research on Collaborative Governance in the Management of the Sultan Syarif Hasyim Grand Forest Park Recreation Site in Minas District, Siak Regency, Riau Province, in 2022-2023. Data collection techniques used in this study included interviews, documentation, and observation.

The results showed that Collaborative Governance has been implemented, but not optimally. Three indicators, namely face-to-face meetings, building trust, and commitment to the process, have not been fully implemented between the UPT KPHP Minas Tahura and other stakeholders. Other obstacles encountered in the Collaborative Governance process are a lack of quality and quantity of human resources, inadequate facilities and infrastructure, and minimal budget allocation for the Management of the Sultan Syarif Hasyim Grand Forest Park Recreation Site.

Keywords: Collaborative Governance, Management, Grand Forest Park

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Didaerah Provinsi Riau sendiri, terdapat beberapa unit kesatuan pengelolaan hutan yang telah terbentuk, salah satunya Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (disingkat ataupun penyebutannya menjadi UPT KPHP) Model Minas, yang memiliki luas sekitar 146.734 ha. yang terdiri dari Hutan Produksi Terbatas 140.562 ha dan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (disingkat ataupun penyebutannya menjadi Tahura SSH) 6.172 ha. Kondisi Tahura SSH saat ini sangat memprihatinkan karena 4.000 ha wilayah Tahura SSH telah rusak

akibat perambahan dan pembukaan lahan kelapa sawit sedangkan yang 2.000 ha lagi sudah mampu untuk dijaga secara ketat dengan patroli rutin, sedangkan sekitar 1.000 ha lebih, sudah dikuasai dan dikembalikan kepada Negara, pengelolaan tahura dibagi menjadi 5 blok diantaranya blok konservasi flora dan fauna, blok kawasan wisata alam, blok tanaman koleksi, blok pemanfaatan, blok rehabilitasi.

Istilah kerjasama yang berlangsung tidak hanya dari pemerintah saja tetapi melibatkan beberapa stakeholder lainnya yaitu Civil Society (masyarakat) and Private Sector (sektor swasta atau dunia usaha) yang saling berinteraksi

menjalankan fungsinya masing-masing secara beriringan. Kerja sama antar pemangku kepentingan yang terlibat dapat diartikan sebagai Collaborative governance. Collaborative governance juga dapat menggambarkan keadaan saling ketergantungan antar aktor. Keinginan melakukan Collaborative governance muncul karena para aktor menyadari adanya keterbatasan yang mereka miliki dan tiap aktor yang terlibat perlu mengakui legitimasi yang dimiliki oleh aktor lain. Dimana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau melalui UPT KPHP Minas Tahura melakukan kolaborasi dengan Yayasan Hutan Belantara dan Yayasan Hutan Riau dalam pengelolaan objek rekreasi Tahura SSH.

Tahura SSH adalah suatu kawasan hutan konservasi yang masuk dalam wilayah kabupaten Kampar, Siak dan Kota Pekanbaru di Provinsi Riau. Kawasan Tahura SSH juga merupakan objek wisata alam. Untuk mencapai kawasan tersebut dapat ditempuh dari ibu kota Provinsi Riau, dari Pekanbaru menuju Minas menempuh jarak 25

km dan waktu tempuh sekitar 30 menit. Tahura SSH dibuka untuk wisata setiap hari dari jam 09.00 WIB sampai jam 16.00 WIB dan tidak dipungut biaya. Tetapi untuk kegiatan Camping Ground per/malamnya dikenakan biaya Rp.20.000 per/orang. Berikut adalah data kunjungan Tahura SSH selama enam tahun terakhir.

Tahura SSH dikelola oleh UPT KPHP Model Minas yang merupakan Unit pelaksana teknis Dinas kehutanan Provinsi Riau yang diatur melalui Peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 tentang pengelolaan Tahura SSH.

Dengan dibentuknya KPHP Model Minas Tahura, diharapkan pengelolaan kawasan konservasi Tahura SSH di Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau secara lebih intensif, lestari dan sesuai fungsinya serta dapat mengoptimalkan kawasan konservasi Tahura SSH sebagai kawasan pelestarian alam guna kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya serta menjadi icon wisata alam dan menjadi salah satu objek pariwisata kebanggaan masyarakat di

Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau serta mencegah timbulnya kerusakan fungsi tatanan lingkungan sekitarnya karena berperan penting bagi perlindungan dan sebagai pusat kekayaan hayati sehingga dengan demikian akan menjadikan Tahura SSH di Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau sebagai salah satu tujuan wisata alam para wisatawan domestik maupun asing.

Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim di Kecamatan Minas Kabupaten Siak merupakan lokasi wisata yang sangat strategis karena dekat dengan ibukota provinsi. Untuk mencapai kawasan tersebut dapat ditempuh dengan route Pekanbaru-Minas dengan jarak 25 Km dari kota pekanbaru dengan waktu tempuh perjalanan lebih kurang 30 menit. Kawasan konservasi Tahura SSH memiliki potensi daerah tujuan ekowisata yaitu wisata alam, area penelitian, untuk kepentingan pendidikan, dan untuk ilmu pengetahuan. Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim memiliki potensi flora dan fauna yang sangat beraneka ragam baik dari jenis yang asli dari kawasan tersebut maupun

yang didatangkan dari luar kawasan. Keanekaragaman jenis flora dan fauna yang saat ini sudah sulit dijumpai di Provinsi Riau menjadi daya tarik tersendiri bagi kawasan konservasi Tahura SSH.

Berdasarkan SK Menhut No. 107/Kpts-II/2003 tanggal 24 Maret 2003 tentang penyelenggaraan tugas pembantuan pengelolaan Tahura SSH oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, maka tugas pembantuan pengelolaan Tahura SSH dilaksanakan oleh Gubernur Riau. Menindaklanjuti Peraturan tersebut, Gubernur Riau membentuk UPT Tahura SSH sebagai pengelola Tahura SSH melalui Peraturan Gubernur Riau No.44 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah No. 3 Tahun 2008, sebagai unsur pelaksana tugas teknis, yang diatur dengan peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2010. UPT Tahura SSH memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Perlindungan sistem penyangga kehidupan.

1. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa asli atau bukan asli.

2. Konservasi, koleksi, edukasi dan riset.

3. Panorama alam dimanfaatkan secara lestari untuk rekreasi.

4. Meningkatkan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya.

5. PAD Provinsi Riau.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No.10 Tahun 2014 tanggal 17 Januari 2014 ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Minas sebagai pengelola, yang didalamnya terdapat Tahura SSH, Pemerintah Provinsi Riau melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 yang mengatur tentang Pengelolaan Tahura SSH, telah membentuk UPT KPHP Model Minas yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau.

UPT KPHP Model Minas sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai pelaksana tugas teknis pengelolaan Tahura SSH yang meliputi Perencanaan untuk menjaga ekosistem lingkungan hidup Tahura SSH, Pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan Dinas lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi Riau, Pemeliharaan fasilitas

rekreasi, tumbuhan dan satwa Tahura SSH, Pemanfaatan potensi sumber daya yang ada di Tahura SSH, Pengembangan wisata alam Tahura SSH, Pengamanan lokasi Tahura SSH dari perambahan hutan dan kebakaran hutan dan Perlindungan flora dan fauna Tahura SSH.

Dengan begitu besar potensi Tahura SSH yang telah dijelaskan sebelumnya, seharusnya dibarengi dengan pelaksanaan pengelolaan yang baik, berdasarkan hasil observasi peneliti pada objek rekreasi Tahura SSH masih banyak didapati objek rekreasi Tahura SSH yang sifatnya kotor, semak, rusak, mangkrak dan tidak terawat, terkhusus dalam penelitian ini peneliti berfokus pada pengelolaan objek rekreasi Tahura SSH yang dikelola oleh UPT KPHP Model Minas.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

***COLLABORATIVE
GOVERNANCE*** **DALAM
PENGELOLAAN OBJEK
REKREASI TAMAN HUTAN
RAYA SULTAN SYARIF**

HASYIM DI KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU TAHUN 2022- 2023

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Di Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau Tahun 2022-2023?
2. Apa saja faktor penghambat *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Di Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau Tahun 2022-2023?

3. Tujuan Penelitian

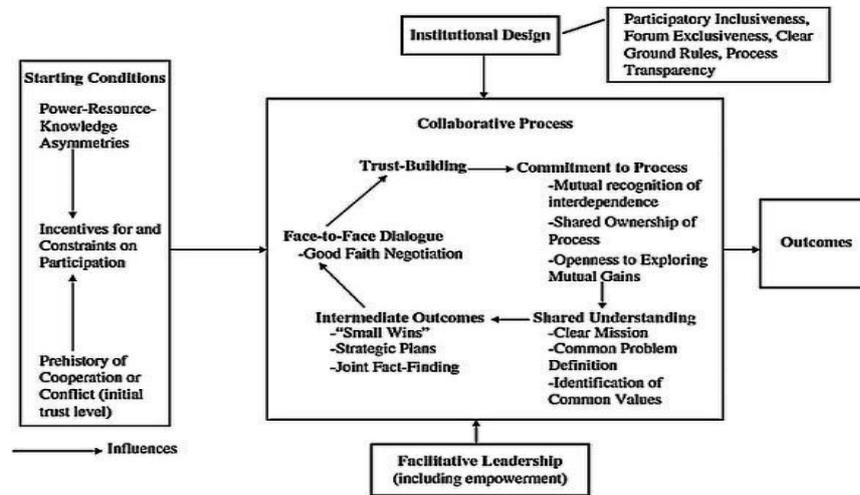
Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Di Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau Tahun 2022-2023
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Di Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau Tahun 2022-2023

B. TINJAUAN TEORI

Proses dari kolaborasi dilakukan dalam beberapa tahapan. Suatu tahapan model kolaborasi menjadi penting untuk diperhatikan sebagai strategi dalam aspek pengelolaan suatu urusan publik. Meskipun proses kolaboratif sulit untuk dilaksanakan karena karakter-karakter dari setiap *stakeholder* yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Selanjutnya Ansell dan Gash (Syaeful Islamy 2018:82) membuat model *Collaborative Governance* sebagai berikut:



Gambar Model Collaborative Governance Ansell & Gash

Sumber: Syaeful Islamy, 2018

a. Face to face dialogue (Dialog Tatap Muka)

Semua bentuk collaborative governance dibangun dari dialog tatap muka secara langsung dari setiap stakeholder yang terlibat. Sebagaimana collaborative governance yang berorientasikan proses, dialog secara langsung sangat penting dalam rangka mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama. Dialog secara tatap muka langsung bukanlah semata-mata merupakan negosiasi yang alakadarnya. Dialog secara langsung ini dapat meminimalisir antagonisme dan disrespect dari antar stakeholder yang terlibat. Sehingga

mereka dapat bekerjasama sesuai dengan tujuan dan kebermanfaatannya bersama.

b. Trust Building (Membangun Kepercayaan)

Buruknya rasa percaya antar stakeholder memang merupakan hal yang lumrah di awal proses kolaborasi. Kolaborasi memang bukan semata tentang negosiasi antar stakeholder, namun lebih dari itu merupakan upaya untuk saling membangun kepercayaan satu dengan yang lainnya. Membangun kepercayaan perlu dilakukan sesegera mungkin ketika proses kolaborasi pertama dilakukan. Hal ini diupayakan agar para stakeholder

tidak mengalami egosentrisme antar institusi. Oleh karenanya, dalam membangun kepercayaan ini, diperlukan pemimpin yang mampu menyadari akan pentingnya kolaborasi.

**c. *Commitment to the process*
(Komitmen Terhadap Proses)**

Komitmen tentunya memiliki relasi yang kuat dalam proses kolaborasi. Komitmen merupakan motivasi untuk terlibat atau berpartisipasi dalam collaborative governance. Komitmen yang kuat dari setiap stakeholder diperlukan untuk mencegah resiko dari proses kolaborasi. Meskipun komitmen memang merupakan hal yang rumit dalam kolaborasi. Komitmen merupakan tanggung jawab dari stakeholder supaya memandang relasi yang dilakukan sebagai hal yang baru dan tanggungjawab tersebut perlu dikembangkan.

**d. *Shared Understanding*
(Pemahaman Bersama)**

Pada poin yang sama dalam proses kolaborasi, stakeholder yang terlibat harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka capai melalui kolaborasi yang dilakukan. Saling

berbagai pemahaman ini dapat digambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama, objektivitas umum, visi bersama, ideologi yang sama, dan lain-lain. saling berbagi pemahaman dapat berimplikasi terhadap kesepakatan bersama untuk memaknai dan mengartikan suatu masalah.

e. *Intermediate Outcomes* (Hasil Sementara)

Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output atau keluaran yang nyata. Hal ini merupakan hasil proses yang kritis dan esensial dalam mengembangkan momentum yang dapat membimbing demi keberhasilan suatu kolaborasi. Intermediate outcomes ini muncul apabila tujuan yang mungkin dan memberikan keuntungan dari kolaborasi yang mana secara relative konkrit dan ketika “small wins” dari suatu kolaborasi dapat dimungkinkan terjadi.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang mana pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan data atas penemuan-penemuan yang

dibutuhkan sesuai atas kebutuhan penelitian. Penelitian kualitatif dapat menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan dan perilaku yang diamati, yang mana pada dasarnya menjelaskan tentang apa yang terjadi dilapangan. Menurut cresswell (John W. Creswell, 2014)

Pendekatan kualitatif merupakan metode yang muncul atas teks atau ambar, yang mana peneliti dapat memposisikan dirinya dalam mengamati perilaku peserta dari waktu ke waktu. Peneliti dapat mengumpulkan makna dari pandangan partisipan atas pertanyaan terbuka yang berasal dari lapangan, dan peneliti berfokus pada konsep atau fenomena yang terjadi, sehingga nanti peneliti dapat memvalidasi keakuratan temuan-temuan, membuat interpretasi data, dan berkolaborasi dengan pihakpihak (John W. Creswell, 2014).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu terdiri dari 2 cara yakni wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan yang dianggap tahu terkait permasalahan penelitian, dan dokumentasi digunakan sebagai memperkuat data-data penelitian

yang berupa dokumen, catatan , buku, gambar, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis data dimulai dari pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi semua proses teknik analisis data di mana seorang peneliti melakukan telaahan awal terhadap data-data yang telah dihasilkan dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek atau fokus penelitian. Sebagaiman makna asalnya, istilah reduksi atau reduction berarti pengurangan atau penentuan ulang.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Di Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau Tahun 2022-2023

a. Face to face dialogue (Dialog Tatap Muka)

Proses pertemuan tatap muka dalam Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim telah dilakukan. Sejauh ini pihak DLHK Provinsi Riau telah melakukan kerjasama oleh pihak

Yayasan Hutan Riau dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim. Pada proses kerjasama yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut, MOU yang dibuat belum diresmikan karena masih dalam tahap diskusi oleh kedua belah pihak. Pembahasan pertemuan tatap muka yang dilakukan tidak jauh dari membahas tentang proses Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim agar pihak yang melakukan kerjasama juga mengerti bahwa Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim. Pada pertemuan itu juga DLHK Provinsi Riau dan pihak UPT KPHP Minas Tahura juga menyampaikan permasalahan yang harus mereka tangani dalam Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim.

DLHK Provinsi Riau melalui UPT KPHP Minas Tahura juga melakukan proses pertemuan tatap muka dengan berbagai stakeholder. Pertemuan tatap muka ini bertujuan untuk membicarakan permasalahan pada Pengelolaan Objek Rekreasi

Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim serta menjadikan Yayasan Berantara dan Yayasan Hutan Riau sebagai salah satu forum yang bisa mengatasi permasalahan pada Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim.

b. Trust Building (Membangun Kepercayaan)

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau melalui UPT KPHP Minas Tahura telah membuat masyarakat dan stakeholder percaya bahwa dengan adanya Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim dilakukan secara berkala dapat membantu meningkatnya jumlah pengunjung di Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, maka dari itu masyarakat telah membuat suatu Yayasan yang diberi nama Yayasan Berantara dan Yayasan Hutan Riau yang berada di bawah naungan DLHK Provinsi Riau. Tujuan dibentuknya yayasan ini salah satunya adalah sebagai jembatan untuk membantu pemerintah dalam Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari trust building (membangun kepercayaan) telah dilaksanakan secara optimal dari pemerintah ke stakeholder lainnya. Dengan berbagai cara yang telah dilakukan DLHK Provinsi Riau dalam membangun kepercayaan pada pihak yang terkait salah satunya masyarakat yang telah membuat yayasan yang tujuannya sebagai jembatan dan membantu pemerintah dalam menangani permasalahan pada Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, serta menyadarkan pihak lainnya untuk membantu proses kegiatan serta program pemerintah dalam bentuk donasi.

c. Commitment to the process
(Komitmen Terhadap Proses)

Komitmen yang sudah dijalankan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dengan pihak terkait masih belum berjalan secara optimal. Belum adanya kesepakatan secara resmi antar instansi terkait karena masih dalam tahap perbincangan dari kedua belah pihak. Seperti dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan,

komitmen yang telah dijalankan dengan Yayasan Hutan Riau dan Yayasan Berantara yang diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Pihak Yayasan Hutan Riau dan Yayasan Berantara hanya menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau karena pihak Yayasan Hutan Riau dan Yayasan Berantara berjalan sesuai dengan izin serta persetujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim di dalam UPT KPHP Minas Tahura melakukan komitmen terhadap prosesnya dengan Yayasan Berantara dan Yayasan Hutan Riau dalam Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim. Komitmen yang telah ditetapkan harus mampu bekerjasama dengan baik dan optimal dalam melakukan tupoksinya walaupun dalam seginya kesepakatan secara resmi seperti MOU masih dibicarakan dan secepatnya akan diresmikan agar proses kerjasama antar pihak di akui

secara resmi dan formal dalam Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim tersebut.

d. Shared Understanding (Pemahaman Bersama)

Kegiatan penyuluhan sosial tidak hanya berupa sosialisai tetapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau berupaya melakukan cara lain untuk membagikan pengertian dan pemahaman secara umum yaitu membagikan informasi tersebut di media sosial seperti benner serta situs web resmi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tentang tata cara Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan pihak UPT KPHP Minas Tahura sudah terus berupaya membagikan pengertian serta pemahaman dengan membuat suatu kegiatan penyuluhan sosial yang diadakan pada hari tertentu dan target yang sudah di tetap oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi Riau dan pihak UPT KPHP Minas Tahura.

e. Intermediate Outcomes (Hasil Sementara)

Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, banyak perubahan yang telah terjadi. Perubahan ini bisa terjadi karena adanya proses kegiatan yang dilakukan didalam UPT KPHP Minas Tahura serta proses kerjasama antar dari beberapa pihak yang terkait.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari hasil proses Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim dari tahun 2020 hingga saat ini telah mendapatkan hasil yang cukup optimal. Dapat dilihat dari perubahan secara signifikan karena dalam proses Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim telah kelola dengan cukup baik oleh pihak UPT KPHP Minas Tahura.

2. Faktor penghambat

***Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Di Kecamatan**

Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau Tahun 2022-2023

a. Sumber Daya Manusia

Masih minimnya pekerja yang bertugas untuk Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim di UPT KPHP Minas Tahura. Hal ini tentunya merupakan salah satu faktor penghambat yang sampai sekarang mempengaruhi keberhasilan proses kolaborasi serta kegiatan Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan proses kegiatan kolaborasi terhambat karena masih kurangnya sumber daya manusia di UPT KPHP Minas Tahura tersebut. Pekerja didalam UPT KPHP Minas Tahura hanya mempunyai 10 orang pegawai yang terkadang tidak hanya menangani Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim saja.

Selain pekerja yang sifatnya masih belum menetap pihak UPT juga memanfaatkan Mahasiswa yang sedang magang di UPT tersebut, hal ini juga membuat kegiatan Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim

semakin terhambat. Tanpa adanya pekerja yang berkualitas di setiap kegiatan, maka proses Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim tidak akan berjalan dengan baik. Maka dari itu peran dari pekerja yang berkualitas dan sifatnya menetap sangat di perlukan di UPT KPHP Minas Tahura untuk menyukseskan Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim tersebut.

b. Sarana dan Prasarana

Pihak dari UPT KPHP Minas Tahura sangat kekurangan dalam sarana dan prasarana hal ini yang menyebabkan terhambatnya Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim. Pihak dinas masih berupaya untuk terus memperbaiki atau menambah sarana dan prasarana yang memadai agar dapat memfasilitasi pengunjung yang datang ke Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim.

c. Anggaran

Minimnya alokasi dana menjadi kendala dan penghambat dalam Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim. Hal ini juga yang menghambat

DLHK Provinsi Riau selaku pihak pemerintah untuk bergerak cepat dalam Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim dan harus mencari sumber pendanaan dari pihak swasta yang bisa melakukan kerjasama.

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi dalam Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim masih mempunyai faktor penghambat didalam pelaksanaannya yang dilakukan oleh DLHK Provinsi Riau, adapun yang menjadi faktor penghambat *Collaborative Governance* yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan anggaran.

E. KESIMPULAN

Collaborative Governance merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung aktor di luar negara, beorientasi konsensus dan musyawarah dalam pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-

program publik. Berdasarkan hasil analisa data yang sudah dilakukan peneliti, tentang *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Di Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau Tahun 2022-2023. Maka peneliti mengambil kesimpulan dan beberapa saran yang nantinya akan bermanfaat bagi UPT KPHP Minas Tahura SSH yang menjadi lokasi penelitian.

1. Dari hasil pembahasan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Di Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau Tahun 2022-2023 sudah terlaksana. Adapun indikator yang menunjukkan sudah terlaksananya *Collaborative Governance* oleh UPT KPHP Minas Tahura adalah sebagai berikut:

- a. *Face To Face Dialogue* (Pertemuan Tatap Muka), Kolaborasi yang dilakukan antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi Riau dengan beberapa stakeholder seperti Yayasan Hutan Riau, Yayasan Berantara, Universitas Lancang Kuning dalam Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim sudah melaksanakan proses tatap muka yang kurang, setiap stakeholder yang terkait harus selalu melakukan pendampingan dan ikut berkontribusi langsung dan bermusyawarah untuk mendiskusikan langkah-langkah dalam Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim.

- b. *Trust Building* (Membangun Kepercayaan), *Trust* dalam kegiatan kolaborasi dalam Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim masih kurang diantara para stakeholder yang terlibat, hal ini terlihat dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dimana dalam proses pembuatan program penanganan anak terlantar pihak Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau selalu mengikutsertakan pihak yang terkait didalam program tersebut, agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik.

- c. *Commitment To Proses* (Komitmen Terhadap Proses), Komitmen dalam proses kolaborasi dalam Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim sudah cukup baik, hal ini dapat terlihat dari kontribusi yang diberikan oleh setiap stakeholder. Dalam komitmen terhadap proses kolaborasi Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim pihak yang terkait harus membuat MoU resmi seperti yang telah dilakukan oleh pihak dinas dan Yayasan.
- d. *Share Understanding* (Berbagi Pemahaman), Saling berbagi permasalahan dan pemahaman antar stakeholder telah nampak Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan

Raya Sultan Syarif Hasyim, hal ini terlihat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yang terbuka tentang permasalahan yang dihadapi terkait Pengelolaan Objek Rekreasi, melakukan sosialisasi tentang Pengelolaan Objek Rekreasi, menyebarkan proses Pengelolaan Objek Rekreasi melalui liflet, benner dan web resmi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

- e. Intermediate Outcome (Hasil Sementara), Hasil sementara yang dapat diperoleh Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim adalah dari setiap tahun telah banyak perubahan, ini dikarenakan bimbingan dari pihak UPT yang khususnya mengajarkan masyarakat tersebut dalam hal Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim.

2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Collaborative Governance dalam Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Di Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau Tahun 2022-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Sumber daya manusia, kurangnya SDM dari UPT KPHP Minas Tahura dalam Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim. Saat ini SDM masih memanfaatkan pekerja yang ada didalam UPT yang masih bersifat belum menetap dan mengharapkan dan melibatkan mahasiswa yang magang di UPT KPHP Minas Tahura.
- b. Sarana dan prasarana, masih diperlukannya sarana dan prasarana yang mendukung dan memadai yang perlu diperbaiki untuk memfasilitasi pengunjung dan perlu juga dilakukan peremajaan terhadap fasilitas-fasilitas yang digunakan.
- c. Anggaran, minimnya anggaran yang dialokasikan

pemerintah menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam dalam Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim dan sulitnya menetapkan Sumber Daya Manusia secara resmi.

F. SARAN

Adapun saran yang penulis ingin sampaikan sebagai masukan dalam *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Di Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau Tahun 2022-2023, yaitu sebagai berikut :

1. UPT KPHP Model Minas harus meningkatkan pengelolaan objek rekreasi Tahura SSH dengan menciptakan kepegawaian yang inovatif, kreatif, responsife serta adaptif dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada setiap kepegawaian.
2. UPT KPHP Model Minas harus memperbaiki Manajemen dalam melakukan pengelolaan objek rekreasi Tahura SSH serta sistem pengelolaan objek rekreasi Tahura SSH dengan melakukan sidak mendadak dalam proses

perawatan dan pemeliharaan objek rekreasi dan menambah jumlah tenaga kebersihan.

3. UPT KPHP Model Minas harus selalu mengabdikan diri dalam melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh, serius, teliti, tulus dan ikhlas dan selalu memupuk rasa saling memiliki Tahura SSH serta menjadi birokrasi yang melaksanakan amanah sesuai tujuan dan wewenang serta tanggung jawab yang telah ditetapkan dengan cara mengapresiasi kepegawaian yang berprestasi, menciptakan kompetisi yang sehat dalam meningkatkan jenjang karir dan promosi jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto. 2015. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Alfiandri, Akbar, Dhani., Ikhsan, Khaerul. 2019. Collaborative Governance: Suatu Konsep Kelembagaan Dalam Dunia Investasi. Tanjung Pinang: Umrah Press.
- Arikunto, S. 2000. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.

- Argo Mukti, Rido dan David Efendi. 2020. Kampung Hijau Gambiran Praktik Tata Kelola Lingkungan Hidup Berbasis Collaborative Governance. Yogyakarta: Samudera Biru
- Follet , Marry Parker, 1997. Manajemen Dalam Organisasi, Kencana, Jakarta
- George R. Terry (Sukarna, 2011;10). Dasar-Dasar Manajemen CV. Mandar Maju. Bandung
- H, L. O. S. I. 2018. Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi. Deepublish
- Islamy, Syaeful. 2018. Collaborative Governance: Konsep dan Aplikasi: Budi Utama
- Manullang dan M. Manullang. 2010. Manajemen Personalialia. Edisi Ketiga. Cetakan Kedua. Gadjah Mada University Press. Jakarta.
- Purwanti, Nurul D, 2016. Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer), Yogyakarta, Center for Policy & Management Studies, FISIPOL UGM
- Ulum, M. C., & Ngindana, R. (2017). Environmental Governance: Isu Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup. Universitas Brawijaya Press.